

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2011-2012

Desia Novita Sary

Email : desyanovitasary@gmail.com

Dibimbing oleh Drs.H.Ishak M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

Regional Autonomy through Act No. 32 of 2004 on Regional Government does not just move the bulk of the authority of the Central Government to Local Government but Act No. 32 of 2004 should bring meaning to the welfare of the people in the area has not materialized.

This study aims to describe and analyze the efforts made by the Government of Regency Kuantan Singingi in maintaining WTP opinion on the financial statements in 2012 and want to know the limiting factors in the financial management area Singingi Kuantan district. This study used a qualitative approach with descriptive type. The process of data collection is done in the Regency Kuantan Singingi particularly in the Financial Section of the Secretariat of Regent Office Kuantan Singingi using interview techniques and documentation.

From the results of the study be concluded that the efforts made by the Government of Kuantan District Singingi in Financial Management Year 2011-2012 is sufficient maximum. Efforts made Singingi Kuantan District Government that is the professionalism of the work Singingi Kuantan District Government, Human Resources for Establishing a quality, appreciation and motivation from leaders to subordinates and has made the Financial Management Information System (SIPKD). But behind the efforts that have been made, there are also some factors inhibiting the Local Government financial management is lalainya most Singingi Kuantan District Government Agencies Kuantan Singingi in UYHD submit to the local treasury.

Keywords: Efforts, Financial management

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hanya saja pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan Opini WTP dengan beberapa Paragraf penjelasan. Sehingga pada tahun 2012 upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu lebih keras lagi. Walaupun dalam pengerjaan pengelolaan keuangannya masih ditemukan beberapa permasalahan namun itu semua tidak mempengaruhi penerimaan Opini WTP untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Satu diantara tuntutan reformasi adalah adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berusaha keras untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan sebaik

mungkin. Berikut merupakan tabel Opini BPK atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2012 :

Tabel I.1

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2012

OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI		
2010	2011	2012
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	WTP DPP (Wwajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : Olahan Lapangan, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sangat bekerja keras dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) sedangkan pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul : **“Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2012”**.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam

Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2012 dengan merumuskan masalah yakni :

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2012?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2012
 - b. Ingin mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teori :
 Penelitian ini berguna untuk pengembangan teori Ilmu Pemerintahan, dapat membantu para dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam menyusun buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah Ilmu Pemerintahan.

b. Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-

- undangan dalam mengelola keuangan
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan atau informasi tentang kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

KERANGKA TEORITIS

Pengelolaan Keuangan

1. Perencanaan

Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan,. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985 : 17).

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas umum penatausahaan keuangan daerah; (b) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (c) penatausahaan penerimaan; dan (d) penatausahaan pengeluaran.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab . Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

5. Pertanggungjawaban

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

- (1) Laporan Realisasi Anggaran,
- (2) Neraca,
- (3) Laporan Arus Kas, dan
- (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian Deskriptif ini tidak memberikan perlakuan,

manipulasi atau pengubahan pada variabel – variabel bebas tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih yang bersangkutan dengan penelitian ini. penentuan informan ini berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang – orang yang mengetahui dengan baik tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan key informan, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2012

Dalam mewujudkan daerah yang maju, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai upaya dan usaha sendiri, terutama dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Profesionalitas kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Dibentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
3. Apresiasi dan Motivasi dari Pimpinan
4. Dibentuknya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Dari Keempat upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diatas, tidak

terlepas dari beberapa aspek dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

a. Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan. Dimana segala sesuatu yang akan dikerjakan harus direncanakan terlebih dahulu. Begitupun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, perencanaan yang matang akan membawa daerahnya lebih baik lagi. Apalagi beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan penghargaan Opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya. Dalam suatu organisasi, baik itu pemerintahan maupun non pemerintahan, kerjasama antara satu pihak dan pihak lainnya sangat dibutuhkan. Satu kesatuan yang dikerjakan oleh tim merupakan pondasi yang kokoh untuk membentuk suatu daerah yang maju.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyiapkan orang-orang yang berkualitas untuk merencanakan dan merumuskan laporan keuangan yang akan diserahkan ke audit BPK. Berikut adalah nama-nama pegawai yang ditempatkan di Sekretariat Bagian Keuangan Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel III.2
Nama-nama Pegawai yang di
Tempatkan di Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
1	DONI IRAWAN, SE	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Penata Laporan Keuangan
2	FERRY SETIAWAN, SE	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Penata Laporan Keuangan
3	MERLI DESARA ROLIN ZAN, SE	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Penata Laporan Keuangan
4	RAFIKA YANTI, SE	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Penata Laporan Keuangan
5	M.DEFRI UTAMA, SE	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Penata Laporan Keuangan
6	MUHARNAS PANGINDRA, A.Md	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Penata Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2014

c. Penatausahaan

Pemerintah Daerah wajib membuat catatan-catatan yang berkaitan dengan rincian secara tertulis dalam mengelola keuangan daerah. Penataan keuangan daerah dibagi dalam :

A. Penatausahaan penerimaan

Menurut ketentuan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Semua penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa Bendahara Umum

Daerah menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
3. Untuk benda berharga seperti karcis retribusi yang dipakai sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga maka penyetorannya dilakukan dengan cara penerbitan tanda bukti pembayaran retribusi tersebut yang disahkan oleh PPKD.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD dan/atau penatausahaan keuangan daerah, kepala daerah perlu menetapkan pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Untuk itu bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkannya kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan atas penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan buku kas, buku pembantu per rincian obyek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Sedangkan bukti penerimaan dan/atau bukti pembayaran yang diperlukan untuk penatausahaan anggaran adalah:

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
2. Surat ketetapan retribusi (SKR);
3. Surat tanda setoran (STS);
4. Surat tanda bukti setoran; dan
5. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

B. Penatausahaan Pengeluaran

Arti dari *pengeluaran daerah* seperti dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan terkait adalah semua arus uang yang keluar dari kas daerah. Hal-hal yang berhubungan dengan penatausahaan pengeluaran adalah: (i) penyediaan dana; (ii) permintaan pembayaran; (iii) perintah membayar; (iv) pencairan dana; dan (v) pertanggungjawaban penggunaan dana.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Dalam menyusun suatu laporan keuangan, sangat diperlukan orang-orang yang berkompenten yang memang mengerti dalam bidang tersebut. Karena jika salah sedikit saja bisa fatal akibatnya bagi daerah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sangat bekerja keras untuk dapat mempertahankan Opini WTP yang telah diraih. Disiplin kerja pegawainya, Apresiasi dan Motivasi dari pimpinannya, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dibuat sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang akan di pertanggungjawabkan setiap tahunnya.

f. Pengawasan

Sejak adanya kebebasan bagi setiap daerah dalam membangun daerahnya, masing-masing daerah tersebut juga mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintah pusat dalam bentuk penyerahan Laporan Keuangan Daerah. Setiap Laporan Keuangan Daerah tersebut di periksa dan dinilai keabsahannya. Bagi daerah yang sudah mempunyai kriteria dalam penerimaan opini WTP maka akan diberikan penghargaan oleh BPK RI. Dan sudah 2 tahun berturut-turut ini tim pengawas dan pemeriksa Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Profesionalitas kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Dibentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
3. Apresiasi dan Motivasi dari Pimpinan terhadap bawahan
4. Dibentuknya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, berikut ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya :

1. Aset yang tidak tertata dengan rapi
2. Sistem informasi yang masih sederhana
3. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas
4. Kurangnya pendataan terhadap aset-aset Pemerintah Daerah
5. Lalainya sebagian dinas-dinas dalam penyerahan UYHD setiap tahunnya

Tetapi jauh dari faktor-faktor penghambat diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah bekerjasama dan bekerja keras untuk mewujudkan Kuansing yang maju sebagai daerah yang patut dicontoh dalam penyusunan laporan keuangannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Merujuk pada konsep pengelolaan yang telah dijelaskan dalam penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebanding dengan apa yang didapatkannya melalui penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Daerah setiap tahunnya. Namun dalam setiap upaya yang dilakukan tidak luput dari berbagai permasalahan yang menjadi penghambat dalam penulisan LKPD Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya yaitu :

1. Lalainya sebagian Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyerahkan UYHD ke kas daerah
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3. Ketiadaan aset daerah
4. Sistem pengelolaan keuangan yang sederhana

Namun itu semua sedikit banyaknya telah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, kerasnya kepemimpinan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadikan pegawai-pegawai yang ada di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi demi mewujudkan suatu tujuan dan kebanggaan bersama atas prestasi yang telah diciptakan.

B. Saran

Adapun saran penulis akan diberikan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan transparansi informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi
2. Bagi instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang melalaikan menyerahkan sisa UYHD ke kas daerah sebaiknya diberikan sanksi
3. Perlu juga adanya peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kuantan Singingi dalam membuat berita acara penghapusan aset daerah.

DAFTAR RUJUKAN

Kumpulan Buku :

Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta; PT. Gramedia Utama, 2009.

Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Gaffar, Afan, Syaekani, Ryaas Rasyid. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002

Jumingan, Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Bumi aksara, 2006

Santoso, Gempur, Metodologi Penelitian, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan perundang-undangan dan sumber lain :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor No 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah

Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun
2012,tentang sumber pendapatan daerah.

Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor
3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Keuangan

Skripsi

Alfajri “ Pengelolaan Keuangan Desa di
Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar” Progam Strata Satu
(S-1) Ilmu Pemerintahan Universitas Riau
Pekanbaru 2010.

Website

Koran Online Kompas:
<http://bisniskeuangan.kompas.com>, *Politik
Anggaran 2012 Fokus Ketersediaan*,
Diakses Pada Rabu, 09 November 2011.

[http://intisari-online.com/read/8-sifat-
pemimpin-yang-baik](http://intisari-online.com/read/8-sifat-pemimpin-yang-baik)